

Hutan Lindung Liang Anggang kian Tergerus

BANJARBARU (IM)- Kondisi Hutan Lindung Liang Anggang di Kota Banjarbaru, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, kian tergerus. Lebih separuh dari luas kawasan hutan lindung Liang Anggang Blok I dan II telah beralih fungsi serta sebagian lain rusak dan rawan terbakar.

Hal ini dikemukakan Kepala Bidang PPDAS Dinas Kehutanan Kalsel, Alif Winarto, Rabu (24/10). “Di Kota Banjarbaru terdapat hutan lindung Liang Anggang Blok I dan II yang kondisinya sebagian telah beralih fungsi untuk berbagai kepentingan. Kawasan ini merupakan etalase provinsi karena merupakan ibu kota dan berdekatan dengan Bandara Syamsudin Noor,” tuturnya.

Menurut Alif, keberadaan HL Liang Anggang yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut perlu mendapat perhatian khusus akibat maraknya alih fungsi untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, perkebunan, dan permukiman. Di samping itu, kondisi lahan gambut yang sudah kering dan rusak sehingga rawan terbakar.

Tercatat luas HL Liang Anggang Blok I seluas 966 hektare dan sekitar 500 hektare di antaranya sudah beralih fungsi. Kondisi serupa juga terjadi pada Blok II seluas 1.290 hektare sebagian besar sudah beralih fungsi untuk berbagai kepentingan.

“Fungsi lindungnya sudah jauh berkurang dan rawan

konflik,” ujarnya.

Dinas Kehutanan Kalsel sendiri dikatakan Alif menjadikan keberadaan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi khusus yang berada pada lahan gambut kritis menjadi sasaran rehabilitasi hutan dan lahan.

Di kawasan ini telah dilakukan penanaman dalam Gerakan Nasional PPDAS seluas 17 hektare serta penanaman lewat skema IPPKH Indocement seluas 458,67 ha. Sayangnya sebagian tanam penghijauan di HL Liang Anggang ikut terbakar.

“Untuk melindungi wilayah ini kita telah membangun posko dan menempatkan petugas patroli. Ada juga izin HKm seluas 125 hektare yang diberikan kepada Masyarakat Peduli Gambut Suka Maju. Kita harapkan ke depan kawasan HL Liang Anggang dapat terlindungi baik ekosistem dan fungsinya juga ada rehabilitasi produktif berbasis ekonomi masyarakat,” tambah Alif.

Di setiap musim kemarau kawasan HL Liang Anggang menjadi salah satu daerah rawan terbakar dan pemicu munculnya kabut asap. Meski sudah jauh berkurang karena aksi pembasahan gambut, hingga kini titik api masih sering muncul di kawasan ini. ●**pra**

Ada 4.000 Lowongan Pekerjaan di Job Fair Kota Bandung November 2023

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menggelar job fair pada 20 November 2023 mendatang, di kawasan Kiara Artha Park, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Andri Darusman mengatakan, job fair pada November mendatang, merupakan kali kedua yang diselenggarakan pihaknya di 2023.

“Perkiraan akan kita laksanakan pada tanggal 20 November dengan mengambil tempat di Kiara Artha Park. Saat ini kita sedang mendata perusahaan-perusahaan yang akan andil,” kata Andri Darusman, Selasa (24/10).

Dikemukakan, job fair kali kedua di tahun ini merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Saat ini, pihaknya mencatat ada sebanyak 137.000 orang menganggur. “Job fair November mendatang, kita laksanakan karena adanya dorongan dari masyarakat dan pihak lainnya. Memang antusias

pencaji kerja di Kota Bandung terbilang tinggi. Maka mari kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini,” ucapnya.

Menurut Andri, setidaknya akan ada sebanyak 4.000 lowongan pekerjaan dalam job fair mendatang. Termasuk lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas yang disiapkan sejumlah perusahaan.

“Kita akan melibatkan 40 perusahaan. Saat ini kita sedang mendata kembali perusahaan-perusahaan mana yang dipastikan ikut serta.

Ia menambahkan, pada job fair akhir 2022, setidaknya telah memperkerjakan sebanyak 59 persen dari 4.000 lowongan pekerjaan. Kita berharap di job fair nanti, angkanya bertambah. Paling banyak diterima adalah posisi marketing. Dan untuk disabilitas juga banyak diterima,” tandasnya. ●**pra**

DORONG TINGKATAN SEKTOR PARIWISATA

PHRI Perkuat Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemkab Bogor



Kadis Disbudpar Kabupaten Bogor, Deni Humaidi dan Ketua PHI membuka Raker PHRI di Cisarua, Kabupaten Bogor.

BOGOR (IM)- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor melaksanakan Rapat Kerja Cabang (Rakercab), guna meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor pasca pandemi Covid-19, di Rizen Hotel Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin (23/10).

Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, Deni Humaidi mengungkapkan, sinergi dan kolaborasi dengan PHRI melalui pertemuan seperti ini memang sangat penting. Karena salah satu tugas Disbudpar yakni meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor.

Berdasarkan catatan kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari target 5 juta kunjungan yang datang

sekitar 6,4 juta sementara tahun 2022 dari target 8 juta justru over target menjadi 15 juta pengunjung. Peningkatan ini berkat kolaborasi dan sinergi antara Pemkab Bogor, PHRI, desa wisata dan para pengusaha.

“Saya ucapkan terimakasih, atas kerjasama yang telah terbangun selama ini sangat luar biasa. Apa yang sudah baik dipertahankan dan yang kurang akan kita tingkatkan agar ke depan bisa lebih baik lagi,” kata Kadisbudpar Deni Humaidi, di hadapan anggota dan undangan PHRI.

Selanjutnya, Perwakilan BPC PHRI Kabupaten Bogor, Ismardianto menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya untuk menciptakan dan menghasilkan kolaborasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Bogor dan di Indonesia secara umumnya. ●**gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PENGENALAN BATIK BANTEN UNTUK MURID TK

Perajin batik membimbing murid Taman Kanak-kanak mewarnai kain batik saat pengenalan pembuatan Batik Banten di Serang, Selasa (24/10). Kegiatan yang berlangsung di sentra pembuatan batik Kebon Kubil tersebut untuk mengenalkan pembuatan batik lokal Banten kepada anak.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wacanakan Diskusi Publik dengan Kandidat Pj Bupati

Sejumlah nama yang telah diusulkan perwakilan masyarakat ke DPRD untuk menjadi Pj Bupati Bogor antara lain, AKBP Iman Imannudin, Asep Engkus Sutisna, Adang Suptandar, dan satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinis di Jakarta.

CIBINONG (IM)- DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto wacanakan penyelenggaraan diskusi publik bersama para kandidat Penjabat (Pj) Bupati Bogor dalam waktu dekat.

Rudy di Cibinong, Bogor, kemarin menjelaskan diskusi tersebut akan digelar terbuka dengan menghadirkan para kandidat yang namanya diusulkan masyarakat. Sehingga, mereka bisa mendengar lang-

sung harapan publik terhadap pembangunan Kabupaten Bogor satu tahun ke depan.

“Rencananya kita undang beliau-beliau (kandidat Pj Bupati) ini, dan juga kita undang perwakilan elemen masyarakat dalam forum diskusi,” ungkap Rudy.

Sejumlah nama yang telah diusulkan perwakilan masyarakat ke DPRD untuk menjadi Pj Bupati Bogor antara lain, AKBP Iman Imannudin, Asep Engkus Sutisna, Adang Suptandar, dan satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinis di Jakarta.

Namun, kata dia, sejauh ini DPRD Kabupaten Bogor masih menunggu surat dari

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rekomendasi nama calon Pj Bupati Bogor mengingat masa jabatan Bupati Periode 2018-2023 akan segera selesai akhir tahun ini.

Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode berikutnya baru digelar September atau November 2024.

Sesuai mekanisme, kata Rudy, pihaknya akan membahas nama-nama tersebut dengan semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bogor. Namun, untuk mendalami siapa yang paling layak untuk direkomendasikan menjadi Pj Bupati Bogor, Rudy juga ingin masyarakat dilibatkan

berdiskusi dengan figur-figur tersebut.

Menurut dia, langkah ini juga sekaligus menetralkan kecurigaan bahwa DPRD lebih cenderung pada figur tertentu.

“Tapi sekali lagi Saya katakan, kita menunggu surat dari Kemendagri,” ujarnya. Diketahui, masa jabatan Bupati Bogor, Iwan Setiawan akan berakhir pada akhir tahun ini. Adapun sesuai dengan agenda penyelenggaraan pemilu, Pilkada serentak 2024 baru akan digelar 27 November 2024. Belakangan, Pemerintah wacanakan Pilkada dimajukan ke September 2024 agar Kepala Daerah terpilih bisa mulai bertugas pada awal tahun 2025. ●**gio**

Sumut Percepat Target Eliminasi TBC

MEDAN (IM)- Sumatera Utara (Sumut) mengejar realisasi eliminasi TB pada 2028 atau dua tahun lebih cepat dari target nasional dengan sejumlah kebijakan khusus di bidang kesehatan. Alwi Mujahit, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, mengatakan Pemerintah Provinsi telah menargetkan eliminasi Tuberkulosis (TB) dapat tercapai pada 2028. “Itu berarti eliminasi TB Sumut dua tahun lebih cepat dari nasional yang ditarget pada 2030,” ungkapnya, Selasa (24/10).

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumut mengeluarkan sejumlah kebijakan khusus di bidang kesehatan agar percepatan target itu dapat tercapai. Kebijakan-kebijakan

itu bersandar pada aspek kecepatan dan sinergitas lintas sektoral. Salah satunya adalah pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di seluruh atau 33 kabupaten/kota di Sumut.

Hal itu perlu dilakukan agar eliminasi TB hingga tingkat terendah dapat semakin cepat terealisasi. Kemudian memasukkan program-program penanganan TB dalam perencanaan daerah dan membuat nomenklatur.

Hal itu dilakukan agar kewajaran anggaran untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan dan non-SPM kesehatan pada pasien TB dapat diukur. Kebijakan lainnya adalah me-

tingkatkan akses layanan, penelitian dan pengembangan penanggulangan TB. Serta peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan lintas sektor.

Alwi optimistis sejumlah kebijakan khusus itu dapat mendukung percepatan target eliminasi TB di Sumut. Terlebih, capaian tingkat keberhasilan pengobatan TB di Sumut sudah mencapai 90% pada 2022.

Tahun lalu, ditemukan dan dilaporkan di Sumut sebanyak 43.000 kasus. Sampai dengan 13 Oktober 2023, keberhasilan pengobatan TBC sudah meningkat menjadi 90,7% dengan notifikasi yang ditemukan sebanyak 35.000 kasus. ●**pra**

Ketua TP-PKK Kab. Bogor Lantik Lima Ketua TP-PKK Kecamatan

BOGOR (IM)- Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bogor, Halimatussadiyah Iwan melantik lima Ketua TP-PKK Kecamatan yakni, Ketua TP-PKK Kecamatan Leuwiliang, Klapanunggal, Gunung Putri, Ciseng dan Cijeruk di Gedung Serbaguna I Setda, Kabupaten Bogor, Senin (23/10).

Selain mengukuhkan lima Ketua TP-PKK Kecamatan, pada kesempatan ini juga dia mengukuhkan Ketua TP-PKK Kecamatan Leuwiliang sebagai Bunda Penurunan Stunting, Ketua TP-PKK Kecamatan Gunung Putri sebagai Bunda literasi, dan Ketua

TP-PKK Kecamatan Cijeruk sebagai bunda anti narkoba.

Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatussadiyah Iwan menyampaikan selamat kepada ketua TP-PKK Kecamatan yang baru dilantik dan dikukuhkan sebagai bunda-bunda, dan diharapkan bisa menjalankan amanah dengan baik.

“Saya yakin dan percaya ibu-ibu sudah memiliki wawasan, pengalaman, dan kemampuan tentang pengelolaan Gerakan PKK. Insha Allah dengan berpedoman pada hasil rapat kerja nasional PKK serta menerapkan pola kepemimpinan yang baik, ibu-ibu akan dapat menjalankan tugas dan fungsi dalam posisi sebagai

pendamping suami, sebagai ketua TP-PKK atau pelindung organisasi perempuan yang ada di wilayah masing-masing,” tutur Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor ini.

Sementara Ketua TP-PKK Kecamatan Leuwiliang, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, ibu Halimatussadiyah Iwan, baik dukungan, supportnya dan semangatnya untuk kami dan kepercayaannya sehingga kami dinobatkan sebagai Duta Penurunan Stunting. Kami akan fokus bergerak melakukan blusukan ke posyandu-posyandu ke daerah lokus stunting setelah pelantikan ini,” tandasnya. ●**gio**



Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatussadiyah Iwan, saat melantik lima ketua TP-PKK kecamatan.

Pemkot Bandung Berencana Perpanjang Masa Darurat Sampah

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana memperpanjang masa darurat sampah yang akan berakhir pada 25 Oktober 2023. Hal itu tercetus dalam Rapat Pleno Satgas Penanggulangan Sampah di Balai Kota, Senin (23/10).

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono di Bandung Selasa (24/10) menyebut, rencana perpanjangan masa darurat sampah di Kota Bandung mesti dibarengi dengan upaya (effort) yang lebih luar biasa.

Ia optimistis dengan berbagai metode yang telah dilakukan, Kota Bandung bisa keluar dari masa darurat ini. Meskipun sudah berbagai upaya dilakukan, data kuantitatifnya belum ada sehingga perlu langkah konkret.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan upaya dan capaian Pemkot Bandung dalam penanganan darurat sampah. Hingga 22 Oktober 2023, total sampah organik yang berhasil diolah sebesar 5,98 ton/hari, sedangkan sampah anorganik sebesar 5,07 ton/hari. Sampah residu yang berhasil diolah sebanyak 0,69 ton/hari. Sehingga jika ditotalkan, sekitar 11,74 ton sampah per hari berhasil diolah. Baca juga: Jawa Barat Optimistis Angka Stunting Capai 14 Persen pada 2024 “Meski belum signifikan, namun kami melihat ada progress, saya juga menekankan, ke depannya upaya penanganan sampah akan diterapkan dengan pola cluster,” ungkapnya.

Mulai dari cluster kantor pemerintahan lanjut Ema, lalu kantor non pemerintahan, pusat perbelanjaan, rumah ibadah. Perhotelan, instansi pendidikan (sekolah dan kampus), dan beberapa cluster lainnya. Sebagai informasi hingga hari ini, telah ada 272 Kawasan Bebas Sampah (KBS) di Kota Bandung. Jumlah ini dipastikan terus bertambah, sebab upaya yang dilakukan Pemkot Bandung antara lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan sampah sejak di level rumah tangga.

“Terkait penanganan berbasis cluster, perlu kami sampaikan dari 39 institusi pelayanan kesehatan, 15 di antaranya telah melaporkan mereka telah mengolah sampah secara mandiri,” imbuhnya.

Ema berharap sosialisasi penanganan sampah mandiri bisa terbangun kesadaran dari berbagai pihak untuk mereduksi jumlah sampah ke TPA. Timbunan sampah yang terbangun harian, akan berkurang jumlahnya kalau masyarakat mind-setnya sudah terbangun.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mendorong Pemkot Bandung segera berkoordinasi dengan Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat, terkait penanganan sampah. “Kita perlu melakukan koordinasi, pendekatan komunikasi dengan Pemprov Jabar atau Penjabat Gubernur. Juga dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Lingkungan Hidup Cluster,” ungkapnya.